



Judul : Kementan Dapat Jempol Senayan  
Tanggal : Sabtu, 28 Agustus 2021  
Surat Kabar : Rakyat Merdeka  
Halaman : 7

## Perbaiki Urusan Pupuk Subsidi **Kementan Dapat Jempol Senayan**

PANITIA Kerja (Panja) Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR melakukan kunjungan spesifik ke Pabrik Pupuk Kujang, milik Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), di Karawang, Jawa Barat, kemarin.

Kunjungan tersebut bertujuan menuntaskan sejumlah persoalan distribusi, dan penggunaan pupuk bagi petani.

Ketua Komisi IV DPR, Sudin mengatakan, kunjungan spesifik ke pabrik pupuk di Karawang merupakan tindak lanjut rapat Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani bersama pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, kunjungan itu merupakan upaya panja mengatasi sejumlah permasalahan terkait pupuk bersubsidi, implementasi program, serta kendala-kendala lain yang berpotensi merugikan petani.

“Selain silaturahmi, kunjungan kami bertujuan menuntaskan berbagai masalah seputar distribusi yang tidak tepat waktu. Kemudian, memastikan penggunaan pupuk bagi kalangan petani, untuk mendorong produktivitas pertanian,” ujar Sudin, di sela kunjungan, di Karawang, Jawa Barat, kemarin.

Lebih lanjut, Sudin mengatakan, pihaknya menghargai upaya dan terobosan Pemerintah dalam distribusi pupuk bersubsidi. Namun, sesal dia, pihaknya masih menemukan tingginya penggunaan pupuk di kalangan petani, yang berpotensi berdampak negatif terhadap budidaya pertanian.

“Permasalahan pupuk bersubsidi dan Kartu Tani adalah pengawasan jaringan. Akurasi

data juga masih menjadi problematika, karena lemahnya pengawasan di lapangan,” tandasnya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Ali Jamil menegaskan, pihaknya berupaya keras memastikan pupuk subsidi dimanfaatkan petani untuk mengembangkan budidaya pertanian. Sebab, pupuk merupakan salah satu kunci peningkatan produktivitas pertanian di lapangan.

“Harapan kami, pembenahan tata kelola pupuk subsidi bisa diselesaikan secara komprehensif. Dengan begitu, pemanfaatan pupuk bersubsidi memacu produktivitas para petani kita di lapangan,” harap Ali.

Sementara Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Muhammad Hatta menambahkan, Kementan berupaya membantu petani agar kebutuhan pupuk bisa tepat jumlah, mutu, waktu, harga dan sasaran.

“Pemberian pupuk bersubsidi harus memenuhi enam prinsip utama yang sudah dicanangkan, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu,” tegas Hatta.

Sedangkan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), Achmad Bakir Pasaman menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi dalam perbaikan tata kelola pupuk subsidi. Di antaranya, penyesuaian atau *update* data Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) penerimaan pupuk subsidi dan Kartu Tani. ■ KAL